

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan segala fungsi serta potensi yang dimilikinya. Manusia dapat belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki pemikiran terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Selain itu, pendidikan juga mampu mengembangkan pemikiran manusia agar lebih kreatif dan inovatif. Dari hal tersebut mereka dapat mengembangkan bakat potensi yang dimilikinya. Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang akan dilakukan setiap kalinya.

Seiring berkembangnya zaman, dari zaman purba hingga zaman modern seperti saat ini, sudah banyak perkembangan dan perubahan yang terasa di dunia ini. Baik dalam perubahan teknologi, perubahan sarana prasarana transportasi, juga perkembangan dalam media komunikasi dan informasi. Manusia dapat melakukan komunikasi serta dapat mendapatkan informasi dengan siapapun dan dimanapun dengan akses yang sangat mudah untuk dicakup. Tanpa harus meragukan batas waktu dan informasi yang didapat, sudah banyak kebutuhan manusia kini mudah didapatkan di era yang sudah serba canggih. Perubahan zaman ini tentu memberi banyak manfaat terhadap kehidupan manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan zaman ini juga dapat memberikan dampak lain kepada negara kita.

Dengan masuknya informasi dan komunikasi ke negara kita, maka mudah pula budaya asing masuk ke tatanan bangsa kita. Hal ini tentunya berdampak terhadap tingkat kepedulian warga negara kita terhadap bangsanya sendiri. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bahwa masuknya budaya asing juga dapat memberi dampak baik terhadap negara kita. Bangsa Indonesia dianggap sebagai salah satu bangsa yang modern. Bangsa yang tentu sudah memiliki nilai-nilai budi pekerti luhur yang dalam kehidupan masyarakatnya dianut serta dijadikan tuntunan hidup oleh warga negaranya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk warisan leluhur yang terbentuk dalam suatu adat istiadat ataupun kebudayaan. Tetapi

disayangkan, keadaan saat ini di lapangan menggambarkan bahwa generasi penerus bangsa kini dengan berbagai permasalahan yang ada terkhusus melibatkan generasi penerus bangsa di dalamnya, cenderung mencerminkan bahwa karakter dari individu atau pola tingkah laku yang ada sudah berkurang bahkan mulai melemah. Hal tersebut sedikitnya berkesinambungan dengan bagaimana mudahnya akses informasi terkait budaya asing ke negara kita.

Sebelum perkembangan zaman yang pesat ini terjadi, kondisi keadaan warga negara Indonesia ini dapat dinilai tingkat kepedulian terhadap negaranya sendiri saja masih rendah. Warga negara yang baik tentunya memiliki kesadaran terkait hak dan kewajibannya terhadap negara, maka dari itu setiap negara pasti memiliki harapan agar penduduk di dalamnya dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Hak dan kewajiban merupakan elemen penting yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Tetapi apabila antara hak dan kewajiban tidak seimbang maka akan terjadi banyak pertentangan di dalamnya.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 yaitu, Bahwa hak warga negara dan penduduk agar dapat berserikat, menyampaikan aspirasi dan pikiran melalui lisan ataupun tulisan, serta syarat-syarat lainnya yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kita bersifat demokrasi. Maka dari itu, peran dari warga negara yang baik (*good citizenship*) menjadi hal penting yang harus dimiliki dalam suatu negara guna mencapai tujuan dari cita-cita negara tersebut.

Kini dapat disayangkan perkembangan zaman memberikan pengaruh negatif terhadap generasi penerus bangsa terutama pada diri peserta didik dalam pengetahuan terkait kewarganegaraan. Kesadaran generasi penerus bangsa untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) terhitung masih rendah. Warga negara Indonesia enggan dalam memikirkan atau turut serta andil dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsanya sendiri. Selain daripada itu, permasalahan yang dapat kita sadari kini mulai mudah untuk dijumpai di lingkungan sekitar. Sebagai contoh permasalahan yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat pada umumnya yaitu kurangnya kesadaran warga negara dalam mematuhi aturan yang sudah dibuat dan berlaku di negara kita. Hal tersebut

mencerminkan bahwa warga negara memang memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam mengimplementasikan pengetahuan kewarganegaraan.

Melemahnya kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya dapat kita jumpai juga dalam diri peserta didik. Tentu mereka sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, juga terhadap keadaan negaranya. Tetapi hari ini kita lihat bahwa di Indonesia, generasi penerus bangsapun memiliki tingkat kesadaran yang lemah dalam memahami pengetahuan terkait kewarganegaraan. Seringnya peserta didik menganggap sepele dan melanggar aturan-aturan yang berlaku menjadi salah satu contoh yang mudah untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, generasi masa kini kurang mementingkan keadaan negaranya, fokus pemikirannya hanya terhadap perkembangan zaman, tanpa memperhatikan bagaimana perkembangan yang terjadi pada bangsanya.

Sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral serta memberi pengetahuan terkait pentingnya menjadi seorang warga negara yang baik terhadap peserta didik, melalui hal tersebut kita dapat melihat sejauh mana sekolah berperan dalam mencapai peran tersebut. Dengan melemahnya pengetahuan kewarganegaraan pada generasi muda khususnya di kalangan peserta didik ini disebabkan oleh akses teknologi terkait informasi terutama mengenai perilaku hidup dari berbagai budaya bangsa yang cenderung terlihat hedonis dan egois sudah terlalu mudah untuk didapatkan oleh generasi muda. Hingga akhirnya hal tersebut dianggap menjadi gaya hidup orang di zaman modern yang dirasa harus menyesuaikan dengan bentuk perkembangan zaman.

Dewasa ini dapat kita lihat, bahwa pendidikan yang berjalan hari ini ternyata kurang mampu dalam menciptakan peserta didik terutama dalam memiliki karakter dan nilai budi pekerti yang luhur. Peningkatan pengetahuan kewarganegaraan terhadap diri peserta didik dapat dilakukan melalui pendidikan sejak dini. Hal tersebut merupakan bentuk kesempatan emas untuk membangun dan membentuk kebiasaan serta kepribadian yang baik dalam diri setiap individu. Kemudian dapat diimplementasikan hal baik tersebut guna mencerminkan ciri seorang warga negara yang baik. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) sebagai berikut:

Pendidikan yang dimaksud merupakan suatu bentuk upaya sadar serta terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran guna membentuk peserta didik agar lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya agar memiliki nilai spiritual keagamaan, bentuk pengendalian diri, kecerdasan individu, berakhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat pada umumnya, bangsa dan juga negara. Selain itu pendidikan nasional juga merupakan bentuk kegiatan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersumber pada nilai agama, kebudayaan nasional serta peka terhadap perkembangan zaman. Sedangkan, sistem pendidikan nasional merupakan seluruh cakupan elemen pendidikan yang didalamnya saling terkait satu sama lain secara terpadu guna mencapai tujuan dari pendidikan nasional.

Permasalahan tersebut sudah menjadi hal penting untuk segera di atasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk upaya mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dibantu dan diwadahi oleh bidang Pendidikan tentunya. Untuk menjadi seorang warga negara yang baik, seorang warga negara harus memiliki tiga kompetensi kewarganegaraan yang diantaranya *civic skills*, *civic knowledge*, dan *civic disposition*. Menurut Branson dalam Sri Wuryan dan Syaifullah (2015, hlm. 78) menyatakan, “Terdapat tiga komponen penting yang ada dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan yang terakhir watak kewarganegaraan (*civic disposition*)”.

Tiga komponen di atas dapat diasah dan dibentuk melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sebagai mata pelajaran yang menyampaikan berbagai nilai-nilai penting di dalamnya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan suasana yang mampu mendukung berbagai macam perkembangan hal positif untuk generasi penerus bangsa, baik itu dalam proses pembelajaran atau dalam bentuk kegiatan lain yang akan dilaksanakan melalui program yang berjalan di sekolah tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab dan Sapriya (2011, hlm.15) mengatakan bahwa “hal tersebut sudah dikenalkan dalam kurikulum sekolah dengan upaya dapat mempersiapkan serta menciptakan seorang warga negara yang

baik (*be a good citizen*)". Tentu peran guru mata pelajaran PPKn memiliki peran yang begitu besar dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki visi, misi, tujuan, serta ruang lingkup isi. Salah satu tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini yaitu berupaya untuk mengembangkan kompetensi kemampuan peserta didik agar ke depannya dapat memiliki kepribadian yang baik, peduli terhadap lingkungan sekitar, berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.

Peran penting dan tanggung jawab guru dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) tersebut kini dirasa semakin kompleks. Dalam proses pembelajaran, peran guru harus lebih dinamis serta kreatif dan inovatif dalam mengembangkan proses pembelajaran. Guru harus senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran tersebut agar sedikit demi sedikit pengetahuan kewarganegaraan yang baik pada diri peserta didik dapat mulai terbentuk dengan sendirinya. Maka dari itu, peran seorang guru PPKn tidak hanya berupa penyampaian materi secara lisan saja, tetapi guru PPKn juga dituntut dapat menghasilkan peningkatan pengetahuan pada diri peserta didik yang kemudian diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses pembelajaran yang di dalamnya mencakup hasil kegiatan belajar peserta didik memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian peserta didik selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran juga mampu dikatakan berhasil apabila setelah pelaksanaan tersebut peserta didik mampu menunjukkan adanya perubahan. Perubahan tersebut kemudian bisa dilihat dari bagaimana kemampuan peserta didik terkait pemikirannya, keterampilan serta sikapnya terhadap suatu permasalahan tersebut. Dewasa ini dapat kita lihat bahwa saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik masih kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga bisa dianggap ketuntasan proses pembelajaran tersebut tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

Seharusnya guru dapat memvariasikan metode atau model pembelajaran yang digunakan agar peserta didik tidak mudah merasa bosan dan materi yang disampaikan dapat membuahkan hasil dan menciptakan suatu perubahan pada diri

peserta didik. Metode yang kini kerap digunakan oleh guru khususnya pada guru mata pelajaran PPKn rata-rata yaitu menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Metode tersebut cenderung membuat peserta didik lebih banyak mendengarkan, mencatat dan menghafal, yang menyebabkan kurangnya partisipasi peserta didik dalam memberikan respon, melatih kemampuan berpikir kritis dan menunjukkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu seorang guru mata pelajaran PPKn terutama dalam meningkatkan *civic knowledge* pada peserta didik dalam mata pelajaran PPKn yaitu dengan memilih salah satu model pembelajaran yang dapat menarik minat serta dapat membangun motivasi belajar peserta didik. Metode ceramah kini sudah menjadi metode pembelajaran yang dapat memberi kesan membosankan dan menjenuhkan terhadap peserta didik. Khususnya pada mata pelajaran PPKn masih dijumpai dalam lingkungan pendidikan terutama lingkup Sekolah Dasar dan Menengah. Metode tersebut masih saja digunakan oleh sebagian pendidik hingga hari ini. Hal tersebut memberi imbas kurangnya motivasi belajar peserta didik terkhusus dalam memahami dan menyimak materi yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Mengingat mulai banyaknya perubahan yang terus mengikuti zaman, maka pendidikanpun banyak mengalami perubahan. Salah satunya yaitu pentingnya pendidikan di Abad 21 yang kini menyesuaikan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dimana pada perkembangan ini lebih memprioritaskan pengetahuan sebagai salah satu hal yang sangat fundamental. Tetapi, pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan Revolusi Industri 4.0 tersebut, maka untuk mewujudkan hal tersebut harus diimbangi juga oleh keterampilan yang dijadikan sebagai dasar yang nantinya dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan berkualitas untuk menghadapi perubahan zaman tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan pada mata pelajaran PPKn adalah model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Guru sangat perlu memperhatikan dan memilih model pembelajaran yang efektif guna menjadikan serta meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir kritis, memiliki kemampuan komunikasi dan memecahkan suatu permasalahan yang pada akhirnya permasalahan tersebut dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada model pembelajaran *Problem Based Learning* ini keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat berperan penting. Model pembelajaran ini berpusat kepada potensi kemampuan dan keterampilan diri peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Model pembelajaran ini tidak mengharuskan peserta didik untuk menghafal permasalahan atau jawaban tersebut, tetapi lebih mengutamakan kepada keluasan cara berpikir peserta didik dalam menggunakan keterampilan dan kemampuannya untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan terkait model pembelajaran *Problem Based Learning* ini maka model pembelajaran tersebut dapat dijadikan suatu alternatif dalam meningkatkan *Civic Knowledge* peserta didik serta membantu peran guru mata pelajaran PPKn dalam peningkatan hal tersebut. Maka dari itu, berdasar pada penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi yaitu “Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan *Civic Knowledge* Melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (Studi Deskriptif pada Peserta Didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merincikan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran pada mata pelajaran PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada Peserta Didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran serta peran guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung?
4. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui terkait perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran serta peran guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung.
3. Mengidentifikasi faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung?
4. Mengidentifikasi bentuk evaluasi terhadap guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang sudah dipaparkan, tentunya penelitian ini dapat memberikan kesan yang baik terhadap pembaca. Maka dari itu, peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai peran guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning* pada pembelajaran PPKn.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah sebagai bentuk gambaran terkait keberhasilan guru terutama peran guru Mata Pelajaran PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* guna membantu mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru dimana diharapkan dapat memberi wawasan serta evaluasi sudah sejauh mana peran guru terutama pada Mata

Pelajaran PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) peserta didik khususnya di lingkungan sekolah.

c. Bagi Peserta Didik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan serta rasa kepedulian yang tinggi terhadap bangsanya sendiri. Sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan pengetahuan kewarganegaraan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan bermasyarakat, bangsa dan negara.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi terkait peran guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* terhadap peserta didik melalui model pembelajaran *Problem Based Learning*.

E. Definisi Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini. Adapun definisi variabel yang dapat peneliti jelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Guru

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa, Guru merupakan seseorang yang memiliki jiwa profesional serta bertugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, menilai, membimbing, melatih, serta memberi evaluasi terhadap peserta didik pada setiap tingkatan pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Arifin dan Barnawi (2017, hlm. 36) mengatakan bahwa, “guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya berat, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan pendidikan menengah”.

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pembelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam aspek spiritual, rasional, emosional dan sosial, menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan peserta didik dalam ikut serta

berpartisipasi sebagai warga negara guna menjadikan dirinya sebagai contoh warga negara yang baik. Menurut Udin S. Winataputra, dkk (2007, hlm. 52) “dalam pembelajaran PPKn, kemampuan dalam menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu hal penting dan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang guru”.

3. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)

Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan) ialah suatu entitas yang harus didapati oleh setiap warga negara. Menurut Branson dalam Sri Wuryan dan Syaifullah (2015, hlm. 78) mengatakan bahwa, “*Civic Knowledge* merupakan suatu hal yang di dalamnya terkandung banyak hal yang harus diketahui oleh warga negara”. Secara khusus, hal-hal yang terkandung dalam pengetahuan kewarganegaraan ini terdiri dari pemahaman terkait hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, prinsip serta proses demokrasi, lembaga pemerintah serta non-pemerintah, identitas nasional, pemerintah yang sesuai dengan hukum (*rules of law*), dan hal-hal riset lainnya yang tidak memihak ketentuan hukum, serta nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

4. Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Problem Based Learning (PBL) atau yang sering disebut Pembelajaran Berbasis Masalah menurut Herminarto S, dkk (2017, hlm. 48 – 49) merupakan, “salah satu bentuk pengembangan kurikulum yang memiliki strategi untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terdapat dasar pengetahuan serta keterampilan dimana peserta didik berperan aktif dalam memecahkan permasalahan tersebut walaupun tidak secara terstruktur”. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL tersebut mengarahkan peserta didik untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan sebuah sistematika untuk membantu mempermudah peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Serta pengerjaan skripsipun dapat diselesaikan secara sistematis dan tersusun. Maka sistematika dalam penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjabaran terkait gambaran dari pokok permasalahan yang sudah dipilih oleh peneliti yang di dalamnya termasuk alasan memilih judul tersebut, latar belakang permasalahan yang dipilih, perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian tersebut.

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Definisi Variabel

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini menjabarkan beberapa hal terkait teori-teori sebagai penunjang materi dari permasalahan yang sudah diambil oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini menjabarkan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang dipilih oleh peneliti, kerangka pemikiran, serta asumsi penelitian dari judul yang diambil.

- A. Tinjauan Umum tentang Peran Guru
- B. Tinjauan Umum tentang *Civic Knowledge*
- C. Tinjauan Umum tentang Mata Pelajaran PPKn
- D. Tinjauan Umum Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)
- E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Asumsi Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan hal seperti pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data untuk dijadikan teknik pengkajian yang akan dilakukan oleh peneliti saat di lapangan.

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Kehadiran Peneliti
- C. Instrument Penelitian
- D. Populasi dan Sampel
- E. Sumber Data

- F. Prosedur Pengumpulan Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Analisis Data
- H. Prosedur Penelitian

BAB IV PAPARAN DATA DAN PENEMUAN

Dalam bab ini memuat terkait pemaparan data yang sudah didapatkan oleh peneliti, pada bagian ini peneliti menjelaskan pembahasan serta mengaitkan dengan hasil penelitian serta dasar teori yang digunakan sesuai dengan sistematika yang ada pada BAB II serta metode yang ada pada BAB III.

- A. Paparan Data
- B. Temuan Penelitian
- C. Pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya dan menjadikan hasil tersebut ke dalam kesimpulan dan saran yang kemudian direkomendasikan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang sudah didapatkan. Dalam kesimpulan peneliti dapat menjabarkan hasil penelitiannya yang sudah didapatkan. Sedangkan dalam bagian saran, peneliti menjabarkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan serta kelemahan yang ada dalam penelitian tersebut, saran ini dibuat untuk ruang lingkup penelitian itu sendiri.

- A. Simpulan
- B. Saran